

**PERANAN NOTARIS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PARA
PIHAK, TERKAIT AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI
(PPJB) YANG DIBUATNYA**

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar

Magister Kenotariatan (MKn)



AULIA GUMILANG ROSADI, SH

1620122029

Pembimbing :

- 1. Prof.Dr. Elwi Danil,SH.,MH**
- 2. Neneng Oktarina,SH.,MH**

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2020

ABSTRACT

NOTARIAL ROLE IN PARTIES DISPUTES SETTLEMENT RELATING TO THE PURCHASE BINDING AGREEMENT'S HE MADE. (Aulia Gumlilang Rosadi, 1620122029, Notary Masters Program, University of Andalas Padang, Thesis 2019)

A notary as a public official appointed by the Government who has the authority (bevoegheid) and liabilities which, if studied comprehensively, has the potential to be subjected to administrative, civil , or criminal claims when a dispute is related to the deed he makes. The main issues that will be discussed in this study are; 1.) the notary's liability in carrying out his duties as a public official in making the deed of Purchase-Binding Agreement (PPJB), 2.) potential disputes that may arise after the deed was made, 3.) and what legal protection exists for the notary and the parties related to the deed. This research is a normative juridical research with statute approach. the data used are secondary data in term of; primary, secondary and tertiary legal materials. The result of the study show that the notary is administratively, civil, and criminally liable for the deed and the process of forming the deed, if a dispute occurs, so the notary needs to implement a policy based on regulation so that he, the deed he makes and the parties can be protected legally.

Keywords : Notary, Liability, PPJB, Dispute

ABSTRAK

**PERANAN NOTARIS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PARA PIHAK TERKAIT AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL-BELI YANG DIBUATNYA.
(Aulia Gumilang Rosadi, 1620122029, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Andalas Padang, Tesis 2019)**

Notaris sebagai pejabat umum yang ditunjuk oleh Pemerintah yang memiliki kewenangan (*bevoegdheid*) dan tanggung jawab yang apabila dikaji secara komprehensif , berpotensi dikenai tuntutan administratif, perdata hingga pidana saat terjadi sengketa terkait akta yang dibuatnya. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah ; 1.) peranan notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum dalam membuat akta Perjanjian Pengikatan Jual-Beli (PPJB), 2.) potensi sengketa yang dapat muncul setelah akta tersebut dibuat, 3.) dan perlindungan hukum apa yang ada terhadap notaris dan para pihak terkait akta tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa ; bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris bertanggungjawab secara administratif, perdata dan pidana terhadap akta serta proses terbentuknya akta itu sendiri, sehingga notaris perlu melaksanakan suatu kebijakan yang berlandaskan peraturan agar dirinya, akta yang dibuatnya serta para pihak dapat terlindungi secara hukum.

Kata kunci: Notaris, Tanggungjawab, PPJB, Sengketa